



PROFIL KEMISKINAN PROVINSI MALUKU UTARA



PROFIL KEMISKINAN PROVINSI MALUKU UTARA

2022

x x
x x
x x
x x
x x
x x



PROFIL KEMISKINAN PROVINSI MALUKU UTARA 2022

ISSN	: 2654-9670
No. Publikasi	: 82000.2325
Katalog BPS	: 3205005.82
Ukuran Buku	: 14,8 cm x 21 cm
Jumlah Halaman	: xii + 54 Halaman
Naskah	: BPS Provinsi Maluku Utara
Penyunting	: BPS Provinsi Maluku Utara
Desain Sampul	: BPS Provinsi Maluku Utara
Diterbitkan Oleh	: ©BPS Provinsi Maluku Utara
Tahun	: 2023

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

TIM PENYUSUN

Profil Kemiskinan Provinsi Maluku Utara 2022

Penanggung Jawab Umum:

Aidil Adha SE, ME

Penanggung Jawab Teknis:

Insaf Santosio SST, M.Si

Penyunting:

Dwi Cahyadi, SST

Penulis:

Dwi Cahyadi, SST

Ridwan Prayogi, S.Tr.Stat.

Pengolah Data:

Ridwan Prayogi, S.Tr.Stat.

Dwi Cahyadi, SST

Desain:

Fahreza Arfan Nur Indriansyah, S.Tr.Stat.

KATA PENGANTAR

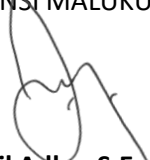
Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah. Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan terpercaya.

Publikasi “Profil Kemiskinan Provinsi Maluku Utara 2022” menyajikan data dan informasi kemiskinan yang mencakup metodologi penghitungan tingkat kemiskinan yang digunakan oleh BPS. Selain itu, publikasi ini juga menyajikan analisis perkembangan tingkat kemiskinan, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan, distribusi dan ketimpangan pengeluaran serta profil rumah tangga miskin di Maluku Utara. Data kemiskinan yang disajikan dalam publikasi ini adalah hasil pengolahan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022.

Diharapkan publikasi ini akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, terutama pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian publikasi ini, disampaikan penghargaan yang tinggi dan terima kasih yang tulus. Saran dan kritik sangat diharapkan untuk perbaikan dan kesempurnaan publikasi yang akan datang.

Ternate, 31 Agustus 2023

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI MALUKU UTARA



Aidil Adha, S.E., M.E.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Ruang Lingkup	3
1.3. Data yang Digunakan	4
BAB II KAJIAN LITERATUR	7
2.1. Definisi Kemiskinan	7
BAB III METODOLOGI	13
3.1. Penghitungan Kemiskinan	13
3.2. Indikator Kemiskinan	18
BAB IV ULASAN TINGKAT KEMISKINAN MALUKU UTARA	23
4.1. Garis Kemiskinan Provinsi Maluku Utara	23
4.2. Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Maluku Utara	25
4.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan	26
4.4. Indeks Keparahan Kemiskinan	29
4.5. Distribusi dan Ketimpangan Pengeluaran	31
BAB V KARAKTERISTIK RUMAH TANGGA MISKIN DI MALUKU UTARA .	37
5.1. Karakteristik Tempat Tinggal (Perumahan)	37
5.2. Karakteristik Ketenagakerjaan	39
5.3. Karakteristik Pendidikan	41
LAMPIRAN TABEL-TABEL	47

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel L.1.a. Garis Kemiskinan di Provinsi Maluku Utara Menurut Daerah, Tahun 2018-2022 (Rupiah/Kapita/Bulan)	47
Tabel L.1.b. Garis Kemiskinan di Provinsi Maluku Utara Menurut Daerah, Tahun 2018-2022 (Rupiah/Kapita/Bulan)	47
Tabel L.2.a. Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Maluku Utara Menurut Daerah, Tahun 2018-2022 (Ribu Jiwa).....	48
Tabel L.2.b. Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Maluku Utara Menurut Daerah, Tahun 2018-2022 (Persen)	48
Tabel L.2.c. Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2018-2022 (Persen)	49
Tabel L.3.a. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Provinsi Maluku Utara Menurut Daerah, Tahun 2018-2023 (Persen).....	49
Tabel L.3.b. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Provinsi Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2020-2023 (Persen)	50
Tabel L.4.a. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Provinsi Maluku Utara Menurut Daerah, Tahun 2018-2023 (Persen).....	50
Tabel L.4.b. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Provinsi Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2020-2023 (Persen)	51
Tabel L.5.a. Gini Ratio di Provinsi Maluku Utara Menurut Daerah, Tahun 2018-2022	51
Tabel L.5.b. Distribusi Pengeluaran Penduduk Maluku Utara Menurut Daerah, Tahun 2022 (persen)	52

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1. Perkembangan Garis Kemiskinan Maluku Utara, Tahun 2018-2022 (Rupiah/Kapita/Bulan).....	23
Gambar 4.2. Perkembangan Garis Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2020-2022 (Rupiah/Kapita/Bulan).....	24
Gambar 4.3. Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Maluku Utara, Tahun 2018-2022	25
Gambar 4.4. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Maluku Utara menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2022 ...	26
Gambar 4.5. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Maluku Utara, Tahun 2018-2022	27
Gambar 4.6. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2020-2022	28
Gambar 4.7. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Maluku Utara, Tahun 2018-2022	29
Gambar 4.8. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2020-2022	30
Gambar 4.9. Perkembangan Gini Ratio Menurut Daerah di Provinsi Maluku Utara, Tahun 2018-2022	32
Gambar 4.10. Distribusi Pengeluaran Penduduk Maluku Utara, Tahun 2022	34
Gambar 5.1. Persentase Penduduk Miskin yang Menggunakan Air Layak di Maluku Utara Tahun 2022	38
Gambar 5.2. Persentase Penduduk Miskin yang Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama di Maluku Utara Tahun 2022	39

Gambar 5.3. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas di Maluku Utara Menurut Status Bekerja Tahun 2022	40
Gambar 5.4. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas di Maluku Utara Menurut Sektor Bekerja Tahun 2022	41
Gambar 5.5. Persentase Angka Melek Huruf Penduduk Miskin di Maluku Utara Tahun 2021 – 2022	42
Gambar 5.6. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Maluku Utara Tahun 2022	43

<https://malut.bps.go.id>



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di daerah manapun. Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat waktu. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Badan Pusat Statistik (BPS) sudah melakukan penghitungan jumlah penduduk miskin secara periodik setiap tiga tahun sejak tahun 1984, dan penyajiannya sampai level provinsi baru dimulai tahun 1990. Sejak tahun 2003, BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin setiap tahun sampai level provinsi. Hal ini bisa terwujud karena sejak tahun 2003 BPS mengumpulkan data Susenas Panel Modul Konsumsi setiap bulan Maret. Selanjutnya mulai tahun 2011 Susenas dilaksanakan secara triwulanan (Maret, Juni, September, dan Desember), BPS mulai menyajikan data kemiskinan untuk level kabupaten/kota meskipun untuk karakteristik rumah tangga miskin hanya dapat disajikan pada tingkat provinsi.

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup analisis mencakup tingkat kemiskinan pada Provinsi Maluku Utara menurut kabupaten/kota pada tahun 2022. Analisis ini juga menyajikan karakteristik rumah tangga miskin, distribusi dan

ketimpangan pendapatan penduduk, serta beberapa indikator kemiskinan lainnya.

1.3. Data yang Digunakan

Sumber data yang digunakan adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenasi) Maret 2022 yang terdiri dari 5570 rumah tangga di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara. Data tersebut dipergunakan untuk estimasi kemiskinan menurut kabupaten/kota serta analisis karakteristik rumah tangga miskin untuk tingkat provinsi.

<https://malut.bps.go.id>



BAB II
KAJIAN LITERATUR

<https://id.scribd.com/document/444444444>

BAB II KAJIAN LITERATUR

2.1. Definisi Kemiskinan

2.1.1. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu daerah pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk “termiskin”, misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/pengeluaran. Kelompok ini merupakan penduduk relatif miskin. Dengan demikian, ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk sehingga dengan menggunakan definisi ini berarti “orang miskin selalu hadir bersama kita”.

Tatkala negara atau daerah menjadi lebih kaya (sejahtera), negara atau daerah tersebut cenderung merevisi garis kemiskinannya menjadi lebih tinggi. Misalnya, Uni Eropa umumnya mendefinisikan penduduk miskin adalah mereka yang mempunyai pendapatan per kapita di bawah 50 persen dari median (rata-rata) pendapatan. Ketika median/rata-rata pendapatan meningkat, garis kemiskinan relatif juga meningkat.

Dalam hal mengidentifikasi dan menentukan sasaran penduduk miskin, maka garis kemiskinan relatif cukup untuk digunakan, dan perlu disesuaikan terhadap tingkat pembangunan daerah secara keseluruhan. Garis kemiskinan relatif tidak dapat dipakai untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar daerah dan waktu karena tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sama.

2.1.2. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum ini diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.

Garis kemiskinan absolut “tetap (tidak berubah)” dalam hal standar hidup. Garis kemiskinan absolut mampu membandingkan kemiskinan secara umum. Garis kemiskinan Amerika Serikat tidak berubah dari tahun ke tahun, sehingga angka kemiskinan sekarang mungkin terbanding dengan angka kemiskinan satu decade yang lalu, dengan catatan bahwa definisi kemiskinan tidak berubah.

Garis kemiskinan absolut sangat penting jika seseorang akan mencoba menilai efek dari kebijakan anti kemiskinan antar waktu, atau memperkirakan dampak dari suatu proyek terhadap kemiskinan (misalnya, pemberian kredit skala kecil). Angka kemiskinan akan terbanding antara satu daerah dengan daerah lain hanya jika garis kemiskinan absolut yang sama digunakan di kedua daerah tersebut. Bank Dunia memerlukan garis kemiskinan absolut agar dapat membandingkan angka kemiskinan antar negara. Hal ini bermanfaat dalam menentukan ke mana menyalurkan sumber daya finansial (dana) yang ada, juga dalam menganalisis kemajuan dalam memerangi kemiskinan.

Pada umumnya ada dua ukuran yang digunakan oleh Bank Dunia, yaitu: a) US \$ 1 PPP per kapita per hari, di mana diperkirakan ada sekitar 1,2 miliar penduduk dunia yang hidup di bawah ukuran tersebut; b) US \$ 2 PPP per kapita per hari, di mana lebih dari 2 miliar penduduk yang hidup kurang dari batas tersebut. US \$ yang digunakan adalah US \$ PPP

(Purchasing Power Parity), bukan nilai tukar resmi (*exchange rate*). Kedua batas ini adalah garis kemiskinan absolut.

2.1.3. Terminologi Kemiskinan Lainnya

Terminologi lain yang juga pernah dikemukakan sebagai wacana adalah kemiskinan struktural. Soetandyo Wignjosoebroto dalam “Kemiskinan Struktural: Masalah dan Kebijakan” yang dirangkum oleh Suyanto (1995) mendefinisikan “Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang ditengarai atau didalihkan bersebab dari kondisi struktur, atau tatanan kehidupan yang tak menguntungkan”. Dikatakan tak menguntungkan karena tatanan itu tak hanya menerbitkan, tetapi (lebih lanjut dari itu) juga melanggengkan kemiskinan di dalam masyarakat.

Di dalam kondisi struktur yang demikian itu, kemiskinan menggejala bukan oleh sebab-sebab yang alami atau oleh sebab-sebab yang pribadi, melainkan oleh sebab tatanan sosial yang tak adil. Tatanan yang tak adil ini menyebabkan banyak warga masyarakat gagal memperoleh peluang dan/atau akses untuk mengembangkan dirinya serta meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga mereka yang malang dan terperangkap ke dalam perlakuan yang tidak adil ini menjadi serba berkekurangan, tak setara dengan tuntutan untuk hidup yang layak dan bermartabat sebagai manusia. Misalnya penduduk yang tinggal di pulau-pulau terluar atau mendekati pulau terluar.



BAB III
METODOLOGI

<https://www.kumparan.com>

BAB III METODOLOGI

3.1. Penghitungan Kemiskinan

3.1.1. Konsep

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

3.1.2. Sumber Data

Sumber data utama yang dipakai adalah data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) Maret 2021 yang dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2022.

3.1.3. Metode

Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM), sehingga: $GK = GKM + GKNM$.

Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk masing - masing provinsi daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari.

Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi- padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak, dan lemak, dll).

Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perkotaan dan 47 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perdesaan.

3.1.4. Teknik Penghitungan Garis Kemiskinan

Tahap pertama adalah menentukan penduduk referensi, yaitu 20 persen penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan Sementara. Garis Kemiskinan Sementara yaitu Garis Kemiskinan periode lalu yang di-inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

Garis kemiskinan makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita perhari. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah:

$$GKM_{jp} = \sum_{k=1}^{52} P_{jkp} \cdot Q_{jkp} = \sum_{k=1}^2 V_{jkp}$$

di mana:

GKM_{jp} = Garis Kemiskinan Makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2.100 kilokalori) provinsi p.

P_{jkp} = Harga komoditi k di daerah j dan provinsi p.

Q_{jkp} = Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j di provinsi p.

V_{jkp} = Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j provinsi p.

- j = Daerah (perkotaan atau perdesaan).
 p = Provinsi ke-p.

Selanjutnya, GKM_j tersebut disetarakan dengan 2.100 kilokalori dengan mengalikan 2.100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sehingga:

$$HK_{jp} = \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{jkp}}{\sum_{k=1}^{52} K_{jkp}}$$

di mana:

- K_{jkp} = kalori dari komoditi k di daerah j provinsi p.
 HK_{jp} = harga rata-rata kalori di daerah j provinsi p.

$$GKM_{jp} = HK_{jp} \times 2.100$$

di mana:

- GKM = Kebutuhan minimum makanan di daerah j, yaitu yang menghasilkan energi setara dengan 2.100 kilokalori/kapita/hari atau Garis Kemiskinan Makanan (GKM)
 j = Daerah (perkotaan/perdesaan)
 p = Provinsi p

Garis kemiskinan non-makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Nilai kebutuhan minimum per komoditi/sub-kelompok non-makanan

dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKD 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibandingkan data Susenas modul konsumsi. Nilai kebutuhan minimum non-makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$GKNM_{jp} = \sum_{k=1}^n r_{kj} V_{kjp}$$

di mana:

$GKNM_{jp}$ = Pengeluaran minimum non-makanan atau garis kemiskinan non-makanan daerah j (kota/desa) dan provinsi p.

V_{kjp} = Nilai pengeluaran per komoditi/sub-kelompok non-makanan daerah j dan provinsi p (dari Susenas modul konsumsi).

r_{kj} = Rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok non-makanan k menurut daerah (hasil SPKKD 2004) dan daerah j (kota+desa).

k = Jenis komoditi non-makanan terpilih. J = Daerah (perkotaan atau perdesaan).

p = Provinsi (perkotaan atau perdesaan).

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin (PM). Persentase penduduk miskin di suatu kabupaten/kota dihitung dengan:

$$\%PM_k = \frac{PM_k}{P_k}$$

di mana:

- $\%PM_k$ = % Penduduk miskin di kabupaten/kota k.
- PM_k = Jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota k.
- P_k = Jumlah penduduk di kabupaten/kota k.

Sementara itu, penduduk miskin untuk level provinsi merupakan jumlah dari penduduk miskin kabupaten/kota atau:

$$PM_p = \sum_{k=1}^n PM_k$$

di mana:

- PM_p = Penduduk miskin provinsi.
- PM_k = Penduduk miskin kabupaten/kota k.
- n = Jumlah kabupaten/kota.

Persentase penduduk miskin provinsi adalah:

$$\%PM_p = \frac{PM_p}{P_p}$$

di mana:

- $\%PM_p$ = Persentase penduduk miskin provinsi.
- PM_p = Jumlah penduduk miskin provinsi.
- P_p = Jumlah penduduk provinsi

3.2. Indikator Kemiskinan

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 indikator kemiskinan yang digunakan, yaitu:

- Pertama, *Head Count Index* (HCI = P0), yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).
- Kedua, Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index* = P1) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
- Ketiga, Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index* = P2) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Foster-Greer-Thorbecke (1984) telah merumuskan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yaitu:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

di mana:

α = 0, 1, 2

Jika $\alpha=0$, diperoleh *Head Count Index* (P0), jika $\alpha=1$ diperoleh Indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index* = P1), jika $\alpha=2$ disebut Indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity* P2)

z = Garis Kemiskinan

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan dari penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i = 1, 2, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n = Jumlah penduduk

<https://malut.bps.go.id>

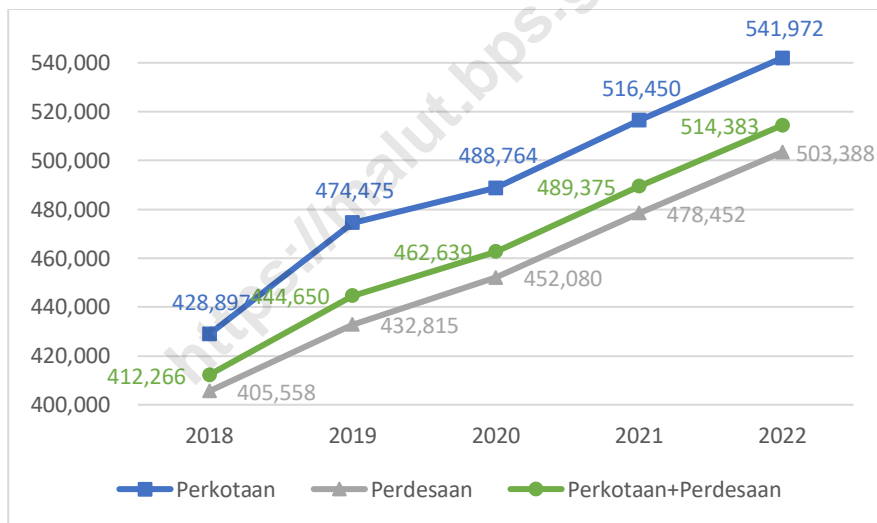


BAB IV
ULASAN TINGKAT KEMISKINAN
MALUKU UTARA

BAB IV ULASAN TINGKAT KEMISKINAN MALUKU UTARA

4.1. Garis Kemiskinan Provinsi Maluku Utara

Selama lima tahun terakhir, garis kemiskinan Provinsi Maluku Utara mengalami kenaikan, baik pada daerah perkotaan maupun perdesaan, tersaji pada Gambar 4.1. Hal ini salah satunya disebabkan oleh inflasi yang menyebabkan kenaikan harga komoditi pembentuk garis kemiskinan yang meliputi komoditi makanan dan komoditi non makanan.

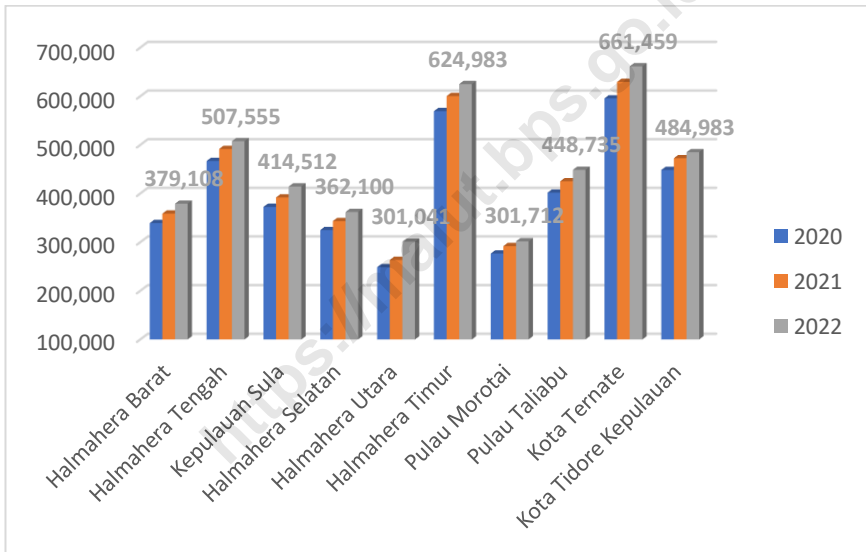


Gambar 4.1 Perkembangan Garis Kemiskinan Maluku Utara, Tahun 2018-2022 (Rupiah/Kapita/Bulan)

Garis kemiskinan di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2022 sebesar Rp514.383,-/kapita/bulan naik sebesar 5,11 persen dari tahun 2021. Pada daerah perkotaan tahun 2022 sebesar Rp541.972,-/kapita/bulan naik sebesar 4,94 persen dari tahun 2021. Sedangkan pada daerah perdesaan, garis kemiskinan tahun 2022 sebesar

Rp503.388,-/kapita/bulan naik sebesar 5,21 persen dari tahun 2021. Selengkapnya tersaji dalam Tabel L.1.

Garis kemiskinan di daerah perdesaan lebih rendah daripada daerah perkotaan karena komoditi untuk penghitungan garis kemiskinan di daerah perdesaan lebih sedikit daripada daerah perkotaan. Selain itu, harga komoditi makanan di daerah perdesaan pada umumnya lebih murah dibandingkan di daerah perkotaan.



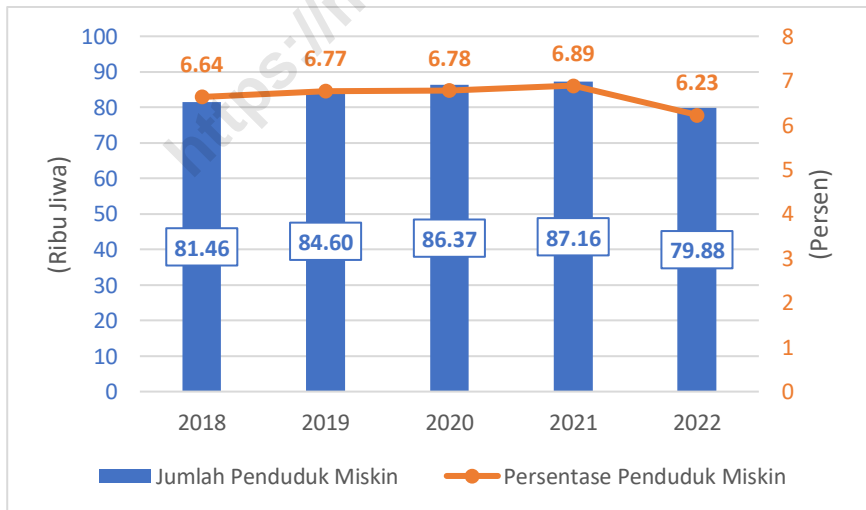
Gambar 4.2 Perkembangan Garis Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2020-2022 (Rupiah/Kapita/Bulan)

Seperti terlihat dalam Gambar 4.2, garis kemiskinan di Kota Ternate merupakan yang tertinggi di Maluku Utara, yaitu sebesar Rp661.459,-/kapita/bulan sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp301.041,-/kapita/bulan. Perbedaan garis kemiskinan tersebut disebabkan oleh perbedaan harga komoditi dalam penghitungan garis kemiskinan di masing-

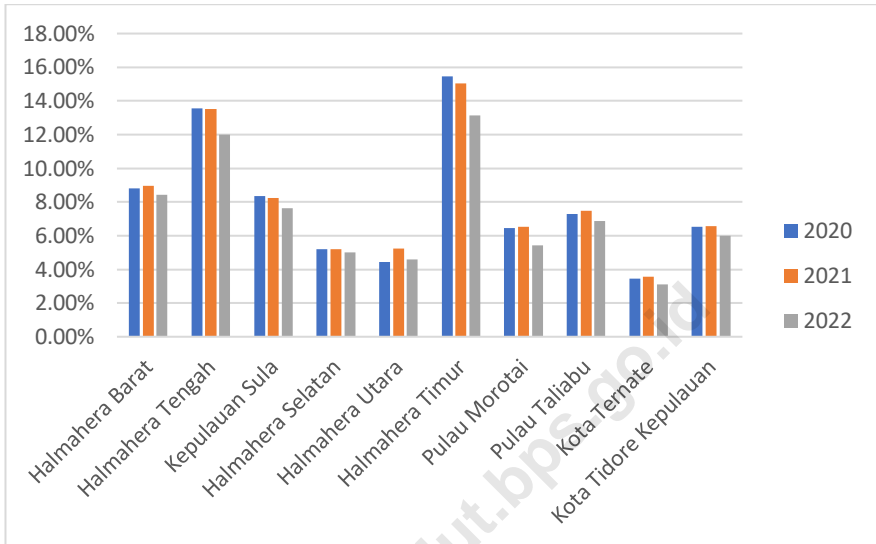
masing kabupaten/kota, baik komoditi makanan maupun non makanan.

4.2. Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Maluku Utara

Secara umum, pada periode 2018-2022, tingkat kemiskinan di Maluku Utara cenderung berfluktuatif. Sejak tahun 2018 hingga 2021, baik pada jumlah maupun persentase penduduk miskin menunjukkan pola semakin meningkat, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022. Jumlah penduduk miskin di Maluku Utara tahun 2022 mencapai 79,88 ribu orang, turun sebanyak 7,28 ribu orang dibandingkan tahun 2021. Pada tahun 2022, persentase penduduk miskin sebesar 6,23 persen, menurun 0,66 persen poin terhadap 2021. Perkembangan tingkat kemiskinan tahun 2018 sampai dengan 2022 disajikan pada Tabel L.2



Gambar 4.3 Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Maluku Utara, Tahun 2018-2022



Gambar 4.4 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Maluku Utara menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2022

Dapat dilihat pada Gambar 4.4., pada tahun 2022 persentase penduduk miskin di seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021. Pada tahun 2022 tingkat kemiskinan tertinggi di Kabupaten Halmahera Timur yaitu sebesar 13,14 persen dan Kabupaten Halmahera Tengah yaitu sebesar 12,00 persen. Sementara itu Kota Ternate memiliki persentase penduduk miskin terendah yaitu hanya sebesar 3,11 persen pada tahun 2022. Kemudian tingkat kemiskinan terendah berikutnya yaitu Kabupaten Halmahera Selatan sebesar 4,99 persen dan Kabupaten Halmahera Utara sebesar 4,58 persen.

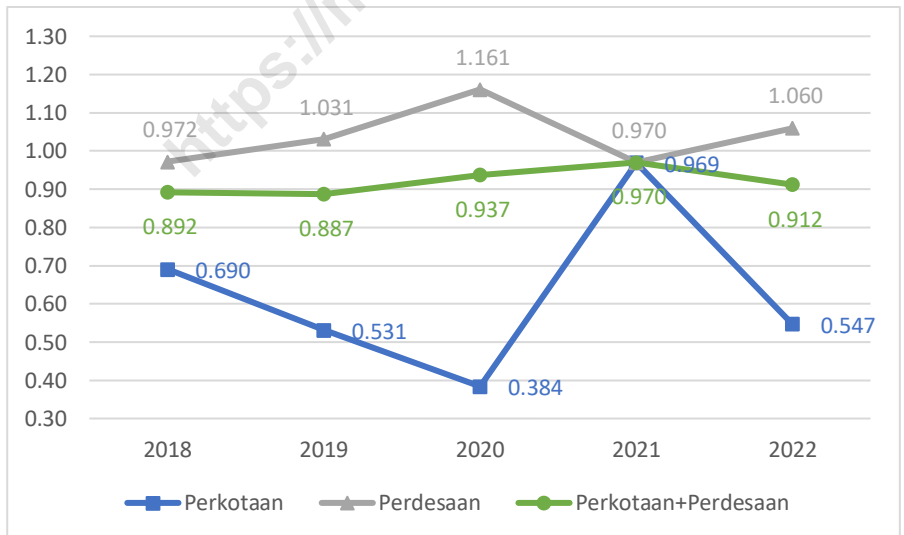
4.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index* = P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-

masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan.

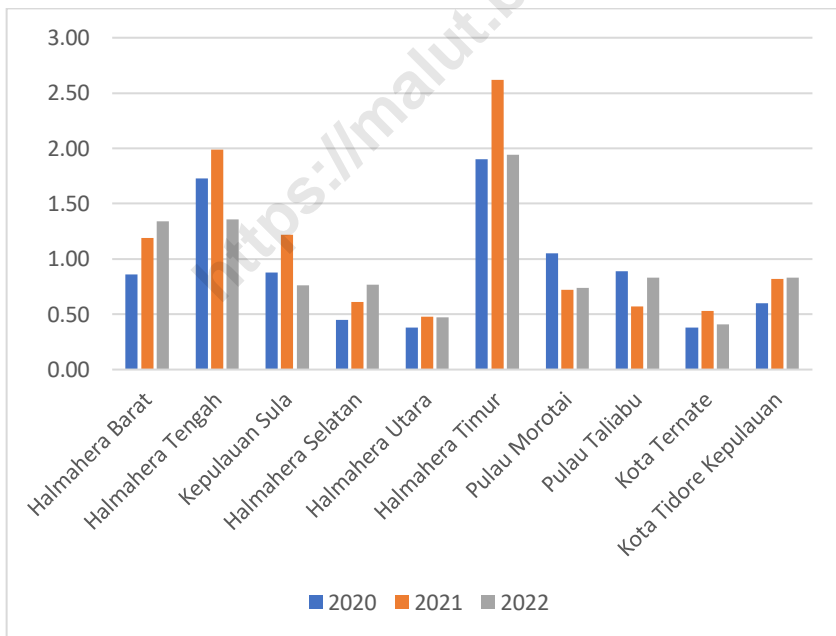
Indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Maluku Utara dalam lima tahun terakhir bergerak fluktuatif. Pada tahun 2022 indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Maluku Utara menurun menjadi 0,912 dibanding tahun 2021 yang sebesar 0,970. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin Maluku Utara semakin mendekati garis kemiskinan.

Jika dibandingkan antara perkotaan dan perdesaan, indeks kedalaman kemiskinan di daerah perdesaan lebih tinggi dibanding perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan di perdesaan lebih dalam dibanding di daerah perkotaan. Selengkapnya disajikan pada Tabel L.3.



Gambar 4.5 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Maluku Utara, Tahun 2018-2022

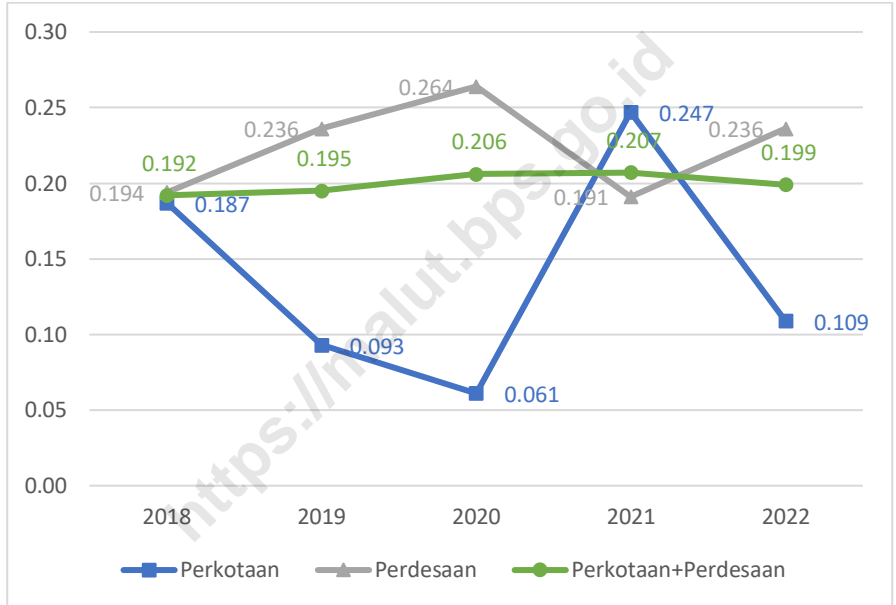
Sementara itu pada Gambar 4.6. di bawah dapat dilihat perkembangan indeks kedalaman kemiskinan menurut kabupaten/kota. Pada tahun 2022, kabupaten yang memiliki indeks kedalaman kemiskinan tertinggi adalah Kabupaten Halmahera Timur yaitu sebesar 2,624 sedangkan indeks kedalaman kemiskinan terendah berada di Kabupaten Halmahera Utara, yaitu sebesar 0,477. Hal ini mengindikasikan bahwa sedikit lebih sulit untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Halmahera Timur daripada di Kabupaten Halmahera Utara karena secara umum penduduk miskin di Kabupaten Halmahera Timur memiliki jarak yang cukup jauh di bawah garis kemiskinan.



Gambar 4.6 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2020-2022

4.4. Indeks Keparahan Kemiskinan

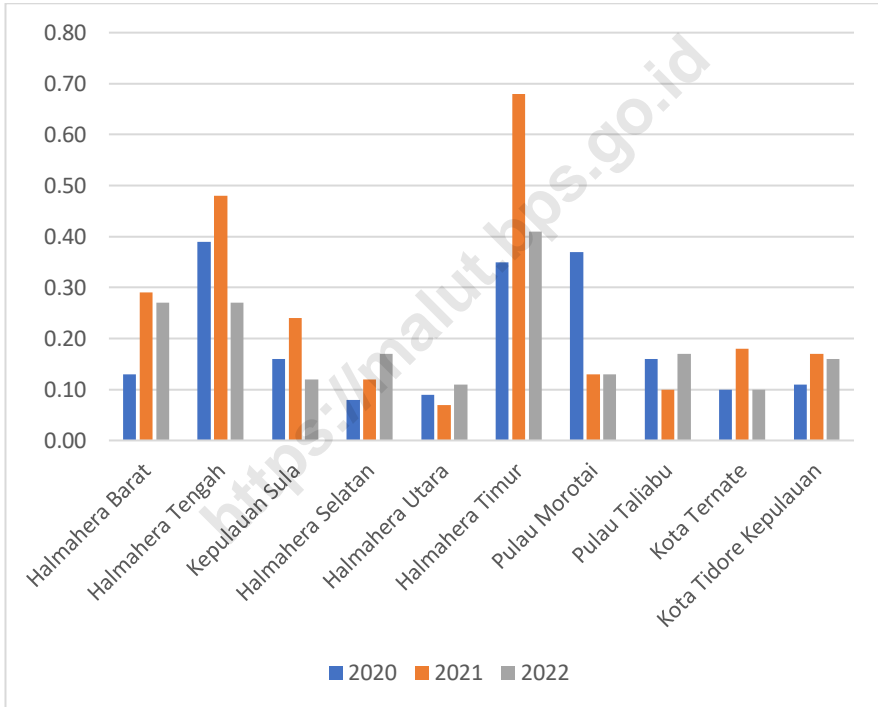
Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index = P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.



Gambar 4.7 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Maluku Utara, Tahun 2018-2022

Pada Gambar 4.7. dapat diketahui bahwa dalam lima tahun terakhir, indeks keparahan kemiskinan Provinsi Maluku Utara cenderung bergerak fluktuatif. Pada tahun 2022, indeks keparahan kemiskinan Provinsi Maluku Utara meningkat sebesar 0,008 menjadi 0,199 dibandingkan tahun 2021 sebesar 0,207. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin cenderung semakin rendah.

Jika dibandingkan antara perkotaan dan perdesaan, indeks keparahan kemiskinan di daerah perkotaan pada tahun 2022 lebih rendah dibandingkan perdesaan. Hal ini menunjukkan ketimpangan pengeluaran antar penduduk di daerah pedesaan cenderung lebih tinggi daripada perkotaan. (Selengkapnya disajikan pada Tabel L.4).



Gambar 4.8 Perkembangan Indeks Keparahkan Kemiskinan Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2020-2022

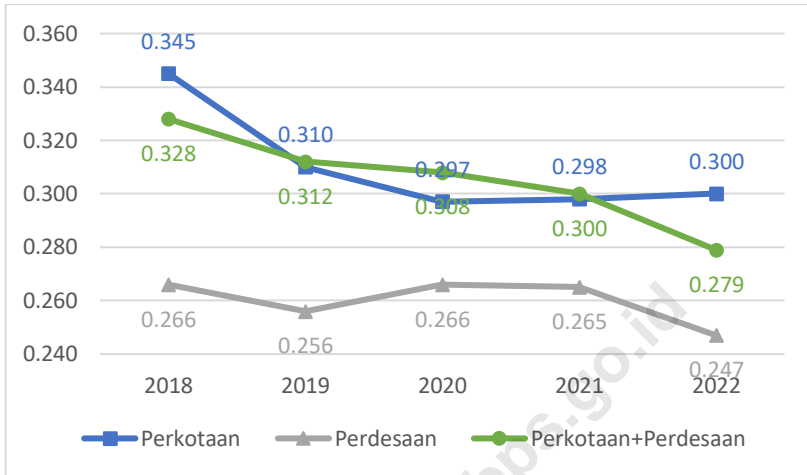
Pada tingkat kabupaten/kota, indeks keparahan kemiskinan pada masing- masing kabupaten/kota cenderung bervariasi. Sebagian besar kabupaten mengalami kenaikan sementara beberapa kabupaten lainnya mengalami penurunan.

Pada gambar 4.8. dapat dilihat bahwa kabupaten yang memiliki indeks keparahan kemiskinan yang tertinggi adalah Halmahera Timur yaitu sebesar 0,41 sedangkan yang paling rendah adalah Kota Ternate, yaitu sebesar 0,10. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan kemiskinan di Kabupaten Halmahera Timur lebih besar daripada di Kota Ternate karena distribusi pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Halmahera Timur lebih beragam.

4.5. Distribusi dan Ketimpangan Pengeluaran

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah *Gini Ratio*. Nilai *Gini Ratio* berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai *Gini Ratio* menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. *Gini Ratio* di Provinsi Maluku Utara berfluktuasi dari waktu ke waktu, namun masih dibawah 0,400 yang termasuk dalam kategori ketimpangan rendah. *Gini Ratio* pada tahun 2022 tercatat sebesar 0,279 turun 0,021 poin dibandingkan dengan *Gini Ratio* tahun 2021 yang sebesar 0,300.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode 2021–2022 *Gini Ratio* di daerah perkotaan mengalami peningkatan sebesar 0,002 poin yaitu dari 0,298 pada tahun 2021 menjadi 0,300 pada tahun 2022. Sebaliknya, di daerah perdesaan nilai *Gini Ratio* mengalami penurunan sebesar 0,018 yaitu dari 0,265 pada tahun 2021 menjadi 0,247 pada tahun 2022. Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Maluku Utara dapat dilihat pada Gambar 4.9.



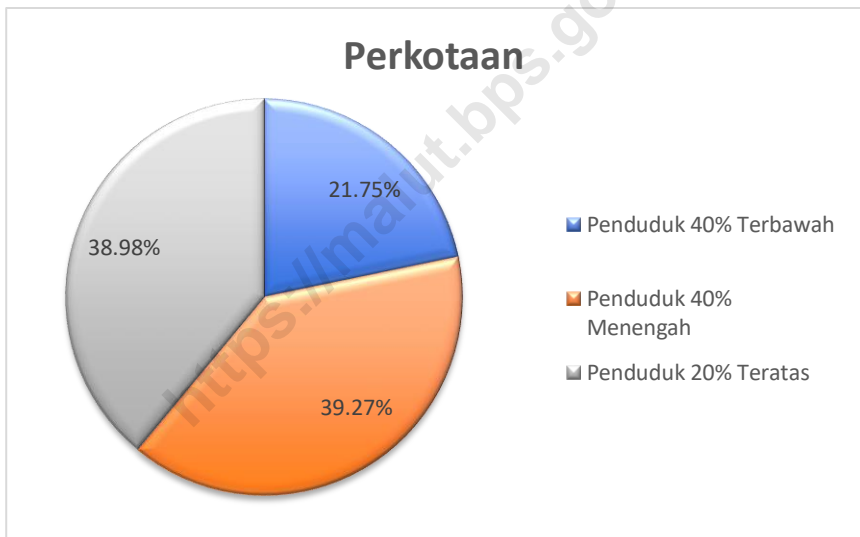
Gambar 4.9 Perkembangan Gini Ratio Menurut Daerah di Provinsi Maluku Utara, Tahun 2018-2022

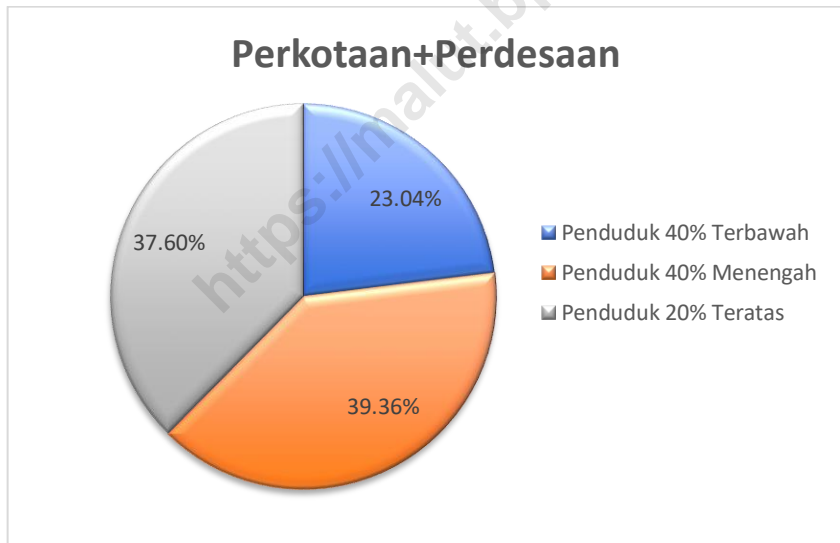
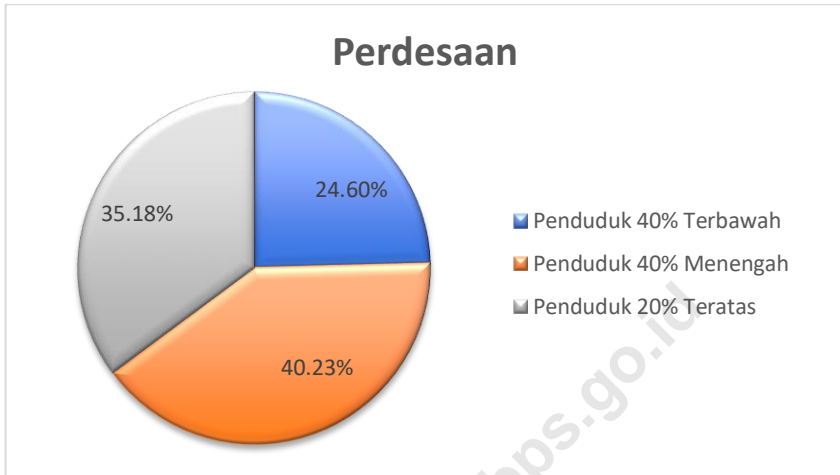
Selain *Gini Ratio*, ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran ketimpangan Bank Dunia (*World Bank*). Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen.

Pada tahun 2022, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 23,04 persen yang termasuk pada kategori ketimpangan rendah. Persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah pada tahun 2022 ini naik jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2021 yang sebesar 21,91 persen. (Selengkapnya disajikan pada Tabel L.5).

Sejalan dengan informasi yang diperoleh dari Gini Ratio, ukuran

ketimpangan Bank Dunia pun mencatat hal yang sama yaitu pola pengeluaran penduduk di daerah perkotaan lebih timpang dibandingkan dengan di daerah perdesaan. Persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan pada tahun 2022 adalah sebesar 21,75 persen, sedangkan di daerah perdesaan yaitu sebesar 24,46 persen. Tingkat ketimpangan dengan ukuran ketimpangan Bank Dunia (*World Bank*) dapat dilihat pada Gambar 4.10.





Gambar 4.10 Distribusi Pengeluaran Penduduk Maluku Utara, Tahun 2022



BAB IV
KARAKTERISTIK RUMAH TANGGA
MISKIN DI MALUKU UTARA

BAB V KARAKTERISTIK RUMAH TANGGA MISKIN DI MALUKU UTARA

Pengukuran kemiskinan yang terpercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Di samping tersedianya data makro yang akurat, ketersediaan profil kemiskinan menjadi sangat penting agar kebijakan program penanggulangan kemiskinan menjadi tepat sasaran dan dapat difokuskan sesuai dengan kebutuhan penduduk miskin tersebut.

Karakteristik rumah tangga miskin diharapkan dapat mengungkap persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi oleh penduduk miskin dan akar persoalan yang selalu menjerat penduduk miskin sehingga tidak mampu terbebas dari kemiskinan dari waktu ke waktu. Selain itu juga diharapkan dapat mendukung usaha-usaha menurunkan kemiskinan agregat. Pemahaman menyeluruh mengenai karakteristik sosial dan dimensi ekonomi penduduk miskin diharapkan mampu membantu perencanaan, pengawasan, dan evaluasi dari program penanggulangan kemiskinan yang efektif dan efisien.

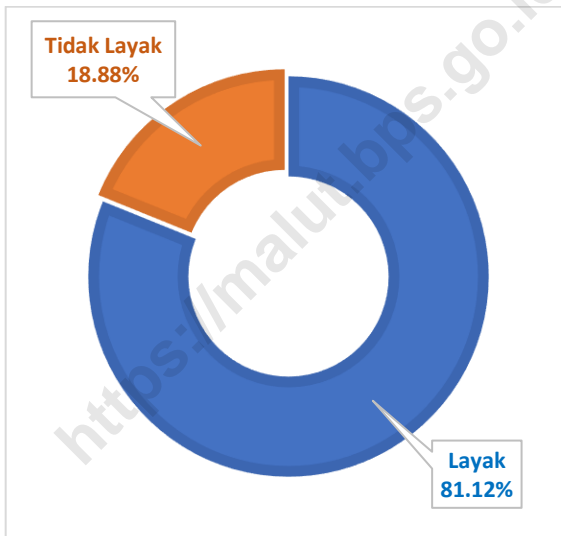
5.1. Karakteristik Tempat Tinggal (Perumahan)

5.1.1. Air Layak

Air yang layak merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap manusia. Air layak pada umumnya digunakan pada aktivitas minum dan memasak setiap rumah tangga. Oleh karena itu, penggunaan air yang layak dapat mendukung keberlangsungan hidup setiap rumah tangga.

Dalam publikasi ini air layak adalah air yang sumber utama air minum berasal dari air tidak sustain (air hujan), air terlindung maupun tidak terlindung dengan syarat sumber mandi/cuci/dll yang digunakan berasal dari air terlindung.

Pada tahun 2022, penggunaan air layak oleh penduduk miskin di Maluku Utara mencapai 81,12 persen. Sementara itu sebesar 18,88 persen penduduk miskin lainnya belum menggunakan air layak.



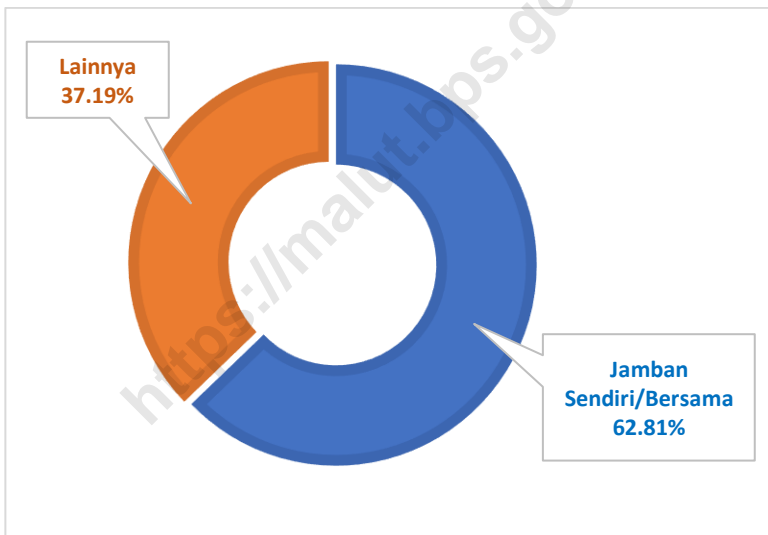
Gambar 5.1. Persentase Penduduk Miskin yang Menggunakan Air Layak di Maluku Utara Tahun 2022

5.1.2. Jamban Sendiri/Bersama

Jamban merupakan salah satu sarana perumahan yang sedianya harus dimiliki oleh seluruh rumah tangga. Penggunaan jamban yang baik turut meningkatkan kesehatan setiap anggota rumah tangga. Sebaliknya penggunaan jamban yang tidak sesuai standar kesehatan akan berdampak buruk pada kesehatan anggota rumah tangga.

Penggunaan jamban di masyarakat terbagi menjadi jamban milik sendiri, jamban bersama yang digunakan secara terbatas oleh dua hingga empat rumah tangga saja, jamban umum yang diperuntukkan secara umum dan tidak memiliki jamban.

Penduduk miskin di Maluku Utara yang diketahui memiliki jamban sendiri/bersama pada tahun 2022 yaitu sebesar 62,81 persen. Sementara itu sebesar 37,19 persen penduduk menggunakan cara lainnya.

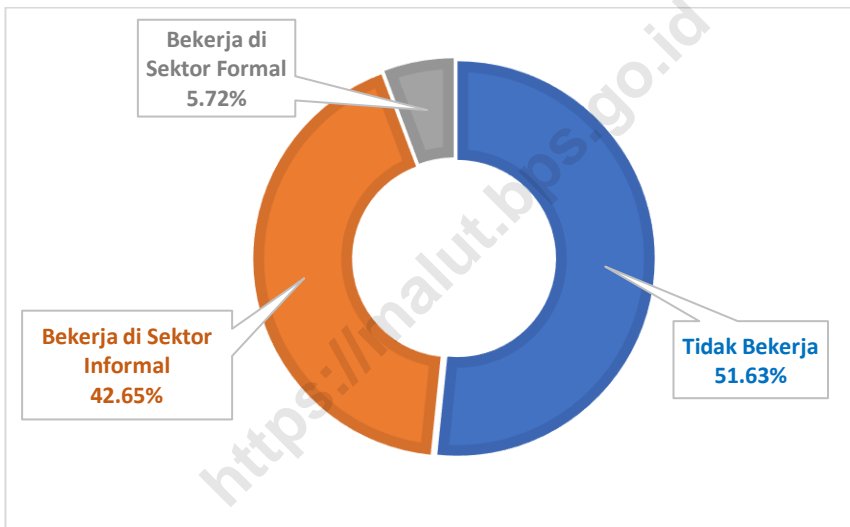


Gambar 5.2. Persentase Penduduk Miskin yang Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama di Maluku Utara Tahun 2022

5.2. Karakteristik Ketenagakerjaan

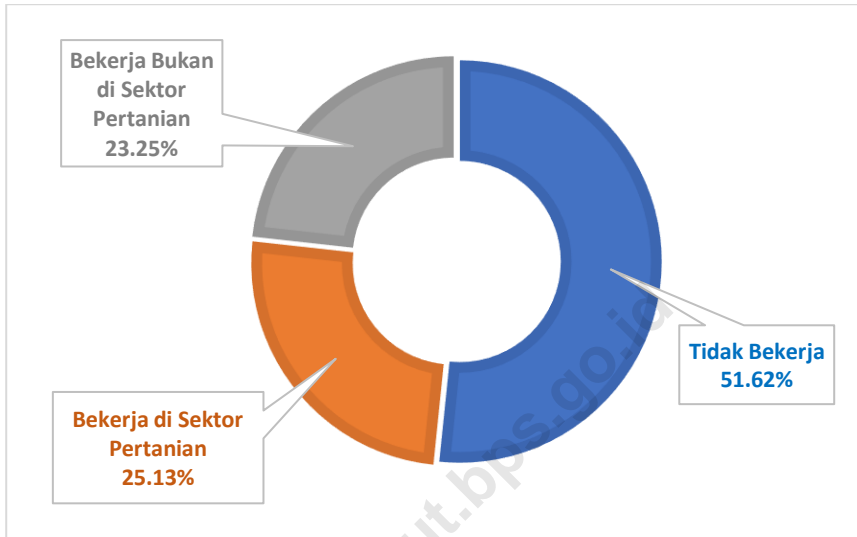
Status Bekerja menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan yang diharapkan dapat mencerminkan kondisi sosial ekonomi suatu rumah tangga. Salah satu karakteristik ketenagakerjaan yang dapat menggambarkan adanya perbedaan antara rumah tangga miskin dan tidak miskin adalah lapangan usaha atau sektor yang menjadi sumber

penghasilan utama rumah tangga. Profil orang miskin seringkali melekat pada mereka yang tidak bekerja atau mereka yang bekerja di sektor pertanian, seperti petani gurem, nelayan, buruh tani dan perkebunan, serta pencari kayu dan madu di hutan. Selain itu penduduk miskin juga cenderung memiliki status bekerja informal, seperti berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak dibayar/keluarga atau pekerja bebas.



Gambar 5.3. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas di Maluku Utara Menurut Status Bekerja Tahun 2022

Pada Gambar 5.3. terlihat bahwa sebesar 51,62 persen penduduk miskin usia 15 Tahun ke atas di Maluku Utara tidak bekerja. Angka tersebut termasuk penduduk yang berstatus pengangguran dan bukan Angkatan kerja. Sementara itu sebesar 42,65 persen penduduk miskin di Maluku Utara bekerja pada sektor informal. Kemudian sebesar 5,72 persen penduduk miskin Maluku Utara bekerja pada sektor formal.

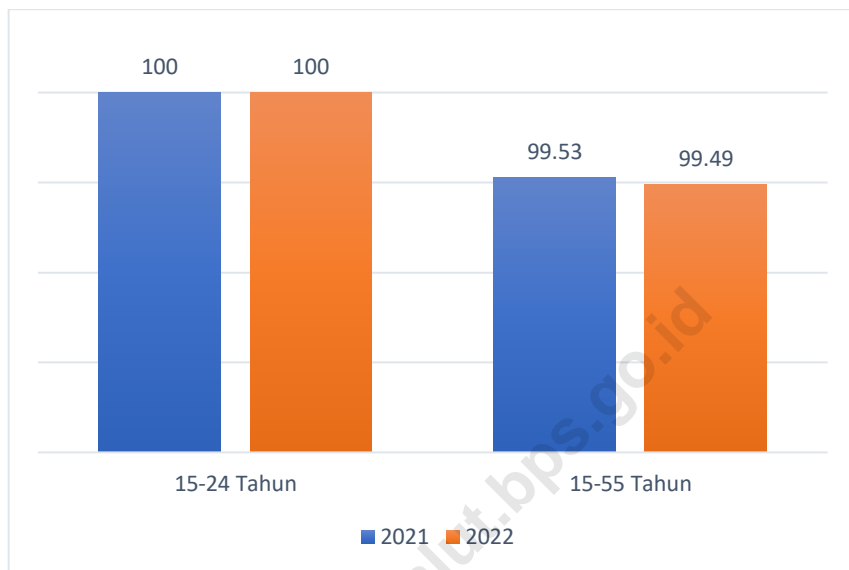


Gambar 5.4. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas di Maluku Utara Menurut Sektor Bekerja Tahun 2022

Kemudian berdasarkan Gambar 5.4, penduduk miskin usia 15 tahun ke atas di Maluku Utara pada tahun 2022 yang bekerja di sektor pertanian yaitu sebesar 25,13 persen. Sementara itu penduduk miskin yang bekerja bukan di sektor pertanian yaitu sebesar 23,25 persen. Data tersebut masih menunjukkan bahwa penduduk miskin mayoritas tidak bekerja sama sekali dan yang bekerja di sektor pertanian hampir sama dengan yang bekerja di bukan sektor pertanian.

5.3. Karakteristik Pendidikan

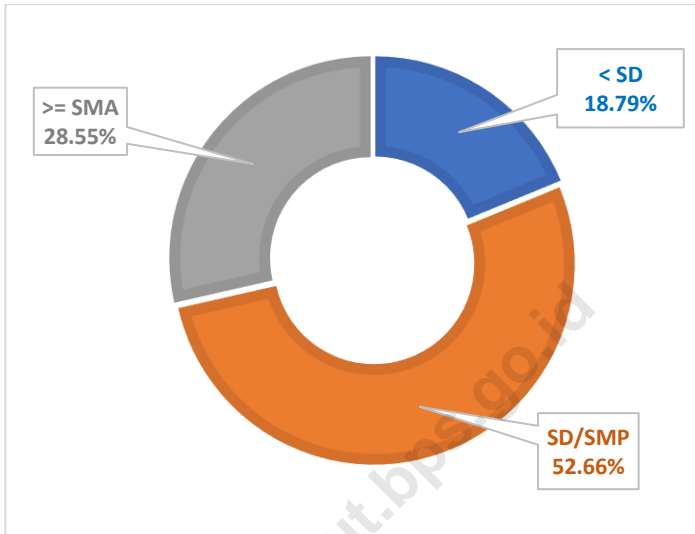
Hubungan antara kemiskinan dan pendidikan sangat penting. Orang yang berpendidikan lebih baik akan mempunyai peluang yang lebih kecil menjadi miskin. Karakteristik pendidikan yang diuraikan disini adalah angka melek huruf (AMH) dan tingkat pendidikan yang ditamatkan.



Gambar 5.5. Persentase Angka Melek Huruf Penduduk Miskin di Maluku Utara Tahun 2021 – 2022

Angka melek huruf (AMH) penduduk miskin menggambarkan proporsi penduduk miskin yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dalam aksara tertentu. Pada publikasi ini AMH dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok usia 15-24 tahun dan usia 15-55 tahun.

Dari Gambar 5.5. dapat dilihat bahwa pada Tahun 2022 AMH penduduk miskin untuk kelompok 15-24 tahun yaitu 100, artinya diyakini bahwa seluruh penduduk miskin usia 15-24 tahun di Maluku Utara dapat membaca dan menulis dengan kalimat sederhana. Sementara itu untuk kelompok usia 15-55 tahun, pada tahun 2022 AMH penduduk miskin Provinsi Maluku Utara yaitu sebesar 99,49. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 99,53. Artinya pada usia antara 25-55 tahun masih terdapat penduduk miskin yang tidak dapat membaca dan menulis kalimat sederhana.



Gambar 5.6. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Maluku Utara Tahun 2022

Berdasarkan pendidikan yang ditamatkan, pendidikan tertinggi yang paling banyak ditamatkan penduduk miskin adalah pendidikan dasar (SD atau SMP), yaitu sebesar 52,66 persen. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SLTA ke atas yang ditamatkan hanya sebesar 28,55 persen. Selain itu sebesar 18,79 persen penduduk miskin yang tidak menamatkan SD atau bahkan tidak pernah bersekolah. Hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga miskin memiliki karakteristik pendidikan yang kurang baik atau rendah.



TABEL-TABEL

<https://manajemenbps.go.id>

LAMPIRAN TABEL-TABEL

Tabel L.1.a. Garis Kemiskinan di Provinsi Maluku Utara Menurut Daerah, Tahun 2018-2022 (Rupiah/Kapita/Bulan)

Tahun	Kategori		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
2018	428.897	405.558	412.266
2019	474.475	432.815	444.650
2020	488.764	452.080	462.639
2021	516.450	478.452	489.375
2022	541.972	503.388	514.383

Tabel L.1.b. Garis Kemiskinan di Provinsi Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2020-2022 (Rupiah/Kapita/Bulan)

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022
Halmahera Barat	339.283	358.707	379.108
Halmahera Tengah	466.973	491.657	507.555
Kepulauan Sula	372.561	391.912	414.512
Halmahera Selatan	324.767	343.323	362.100
Halmahera Utara	248.544	263.507	301.041
Halmahera Timur	569.464	600.339	624.983
Pulau Morotai	276.746	291.879	301.712
Pulau Taliabu	401.710	425.241	448.735
Kota Ternate	595.553	629.463	661.459
Kota Tidore Kepulauan	448.352	472.651	484.983

Tabel L.2.a. Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Maluku Utara Menurut Daerah, Tahun 2018-2022 (Ribu Jiwa)

Tahun	Kategori		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
2018	13,34	68,12	81,46
2019	15,32	69,28	84,60
2020	16,58	69,79	86,37
2021	18,54	68,62	87,16
2022	19,09	60,79	79,87

Tabel L.2.b. Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Maluku Utara Menurut Daerah, Tahun 2018-2022 (Persen)

Tahun	Kategori		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
2018	3,80	7,78	6,64
2019	4,27	7,78	6,77
2020	4,53	7,70	6,78
2021	5,13	7,59	6,89
2022	5,18	6,66	6,23

Tabel L.2.c. Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2018-2022 (Persen)

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022
Halmahera Barat	8,82	8,95	8,43
Halmahera Tengah	13,56	13,52	12,00
Kepulauan Sula	8,35	8,23	7,64
Halmahera Selatan	5,21	5,19	4,99
Halmahera Utara	4,45	5,22	4,58
Halmahera Timur	15,45	15,04	13,14
Pulau Morotai	6,46	6,52	5,42
Pulau Taliabu	7,3	7,49	6,88
Kota Ternate	3,46	3,55	3,11
Kota Tidore Kepulauan	6,52	6,58	5,99

Tabel L.3.a. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Provinsi Maluku Utara Menurut Daerah, Tahun 2018-2023 (Persen)

Tahun	Kategori		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
2018	0,690	0,972	0,892
2019	0,531	1,031	0,887
2020	0,384	1,161	0,937
2021	0,969	0,970	0,970
2022	0,547	1,060	0,912

Tabel L.3.b. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Provinsi Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2020-2023 (Persen)

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022
Halmahera Barat	0,86	1,19	1,34
Halmahera Tengah	1,73	1,99	1,36
Kepulauan Sula	0,88	1,22	0,76
Halmahera Selatan	0,45	0,61	0,77
Halmahera Utara	0,38	0,48	0,47
Halmahera Timur	1,9	2,62	1,94
Pulau Morotai	1,05	0,72	0,74
Pulau Taliabu	0,89	0,57	0,83
Kota Ternate	0,38	0,53	0,41
Kota Tidore Kepulauan	0,6	0,82	0,83

Tabel L.4.a. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Provinsi Maluku Utara Menurut Daerah, Tahun 2018-2023 (Persen)

Tahun	Kategori		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
2018	0,187	0,194	0,192
2019	0,093	0,236	0,195
2020	0,061	0,264	0,206
2021	0,247	0,191	0,207
2022	0,109	0,236	0,199

Tabel L.4.b. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Provinsi Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2020-2023 (Persen)

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022
Halmahera Barat	0,13	0,29	0,27
Halmahera Tengah	0,39	0,48	0,27
Kepulauan Sula	0,16	0,24	0,12
Halmahera Selatan	0,08	0,12	0,17
Halmahera Utara	0,09	0,07	0,11
Halmahera Timur	0,35	0,68	0,41
Pulau Morotai	0,37	0,13	0,13
Pulau Taliabu	0,16	0,10	0,17
Kota Ternate	0,1	0,18	0,10
Kota Tidore Kepulauan	0,11	0,17	0,16

Tabel L.5.a. Gini Ratio di Provinsi Maluku Utara Menurut Daerah, Tahun 2018-2022

Tahun	Kategori		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
2018	0,345	0,266	0,328
2019	0,310	0,256	0,312
2020	0,297	0,266	0,308
2021	0,298	0,265	0,300
2022	0,300	0,247	0,279

Tabel L.5.b. Distribusi Pengeluaran Penduduk Maluku Utara Menurut Daerah, Tahun 2022 (persen)

Tahun	Kategori		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan
Penduduk 40 persen Terbawah	21,75	24,60	23,04
Penduduk 40 persen Menengah	39,27	40,23	39,36
Penduduk 20 persen Teratas	38,98	35,18	37,60

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik dan World Bank Institute. 2002. *Dasar-dasar Analisis Kemiskinan*. BPS: Jakarta.

Badan Pusat Statistik. 2022. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2022*. BPS: Jakarta

Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara. 2022. *Profil Kemiskinan Provinsi Maluku Utara 2021*. BPS Provinsi Maluku Utara: Ternate.

Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara. 2022. *Berita Resmi Statistik Provinsi Maluku Utara No. 035/07/82/Th.XXI*. BPS Provinsi Maluku Utara: Ternate.

Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara. 2022. *Berita Resmi Statistik Provinsi Maluku Utara No. 036/07/82/Th.XXI*. BPS Provinsi Maluku Utara: Ternate.

ST 2023

SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://malut.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI MALUKU UTARA**

Jl. Stadion No. 65 Ternate Tengah 97712
Telp (0921) 3127878, Fax: (0921) 3126301
Homepage: <http://malut.bps.go.id> E-mail: bps8200@bps.go.id

ISSN 2654-9670



9 772654 967008 >